

**PERAN DIPORABUDPAR DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI KREATIF MASYARAKAT DI WILAYAH
PANTAI SEJARAH KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

OLEH :

DIMAS PRATAMA

2003090061

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2024

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : DIMAS PRATAMA
N P M : 2003090061
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Pada hari, tanggal : Rabu, 05 Mei 2024
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP
PENGUJI II : Dra. Hj. YURISNA TANJUNG, MAP
PENGUJI III : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

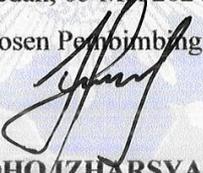
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

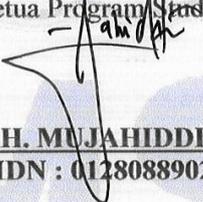
Nama Lengkap : DIMAS PRATAMA
N.P.M : 2003090061
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : PERAN DISPORABUDPAR DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KRATIF MASYARAKAT DI WILAYAH PANTAI SEJARAH KABUPATEN BATU BARA

Medan, 05 Mei 2024

Dosen Pembimbing


Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si
NIDN : 0117019201

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP
NIDN : 0128088902

Dekan,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP.
NIDN : 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **DIMAS PRATAMA**, NPM 2003090061 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memaisukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 05 Mei 2024

; menyatakan,



DIMAS PRATAMA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“PERAN DISPORABUDPAR DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT DI WILAYAH PANTAI SEJARAH KABUPATEN BATU BARA”** sebagai syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikan Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Kesejahteraan Sosial. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk yang istimewa kedua orang tua tercinta Bapak M. Suprpto dan Ibunda Suratini serta abang penulis Eko Sahputra, Adik Elisa Pitia, Nenek Tuminem, Pacar Sri Wahyuni dan Penulis juga banyak – banyak mengucapkan terimakasih kepada sahabat saya Gita Nurhasanah, Mhd. Su’ib, Riyandi Wahyu Siagian, Adrian Hariadi Napitupulu, Domita Riski Ananda, Nur Aini Wahidah yang senantiasa memberikan kasih sayang, Do’a, Nasehat, serta dukungan semangat selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jajaran dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi S – 1 Kesejahteraan Sosial hingga sampai penyusunan

Skripsi. Serta tidak lupa pula diucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos. M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Hj. Dra. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Asoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos. M. SP selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selaku Dosen yang mengajari saya selama menempuh pendidikan dan dosen yang selalu memberikan masukan kepada saya.
6. Bapak Sahran Sahputra. S.Sos. M.Sos selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan dosen yang memberikan motivasi dan dukungan kepada saya selama berproses belajar.
7. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.sos., M.SI selaku Sekertaris Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen pembimbing Skripsi yang senantiasa Membimbing dan Memberikan Motifasi dan Semangat kepada saya selama proses pembuatan Skripsi.

8. Bapak ibu Dosen dan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, Terkhusus Dosen-dosen jurusan Kesejahteraan Sosial yang memberikan arahan dan pembelajaran bagi saya.
9. Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera utara yang telah menjadi wadah bagi saya untuk berproses belajar dan menempah karakter penulis menjadi pribadi yang tangguh.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan juga menjadi rekomendasi ketika ada masalah-masalah terkait yang dibahas di penelitian ini, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya, sekiranya dapat disempurnakan di kesempatan lain dan semoga Allah memberikan kepada pihak-pihak, yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 14 Mei 2024



DIMAS PRATAMA
NPM : 2003090061

**PERAN DISPORABUDPAR DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI KREATIF MASYARAKAT DIWILAYAH PANTI
SEJARAH KABUPATEN BATUBARA**

DIMAS PRATAMA

2003090061

ABSTRAK

Pemberdayaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan taraf Hidup Masyarakat. Sejumlah tindakan dilakukan untuk meningkatkan kewenangan atau pemberdayaan kelompok marjinal dalam masyarakat, khususnya mereka yang hidup dalam kemiskinan, dengan istilah “pendampingan” atau “pemberdayaan”. Dalam contoh ini, kita akan melihat bagaimana DISPORABUDPAR membantu masyarakat pesisir Kabupaten BatuBara yang secara historis penting mengembangkan ekonomi kreatif mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana DISPORABUDPAR membantu ekonomi kreatif masyarakat Pantai Sejarah di Kabupaten BatuBara. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, yang meliputi teknik wawancara. Peran Disporabudpar Dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif Masyarakat Di Wilayah Pantai Sejarah Kabupaten Batu Bara telah terlaksana, akan tetapi hal ini kurang efektif di karenakan terdapat Indikator Implementasi dan Evaluasi sebagai tahap pendampingan tidak terlaksana

Kata Kunci : Pemberdayaan, dan Ekonomi Kreatif Masyarakat.

Abstract

Empowerment is an activity carried out to improve people's standard of living. A number of actions were taken to increase the authority or empowerment of marginalized groups in society, especially those living in poverty, with the term "assistance" or "empowerment". In this example, we will see how DISPORABUDPAR helps the historically important coastal communities of BatuBara Regency develop their creative economy. The aim of this research is to find out how DISPORABUDPAR helps the creative economy of the Historic Beach community in BatuBara Regency. The research was conducted using qualitative methods, which included interview techniques. The role of Disporabudpar in improving the creative economy of communities in the historical coastal areas of Batu Bara Regency has been implemented, however this is less effective because there are implementation and evaluation indicators as a mentoring stage that have not been implemented.

Keywords: Empowerment and Community Creative Economy.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Sistematika Penulisan	3
BAB II URAIAN TEORITIS	5
2.1 Peran Pemerintah	5
2.1.1 Pengertian Peran Pemerintah	5
2.1.2 Jenis Peran Pemerintah	9
2.1.3 Fungsi Pemerintah	11
2.2 Pemberdayaan	12
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan	12
2.2.2 Tujuan Pemberdayaan.....	15
2.2.3 Prinsip Pemberdayaan.....	15
2.2.4 Tahapan Pemberdayaan	16
2.2.5 Relasi Pemberdayaan Dengan Pembangunan Ekonomi	18
3.1 Ekonomi Kreatif	19
3.3.1 Pengertian Ekonomi Kreatif.....	19
3.3.2 Manfaat Ekonomi Kreatif Untuk Masyarakat.....	20
3.3.3 Manfaat Ekonomi Kreatif Untuk Negara.....	21
4.1 DISPORABUDPAR.....	21
4.4.1 Pengertian DISPORABUDPAR	21
4.4.2 Arti Otonomi Daerah Menurut Ahli.....	22
4.4.3 Peraturan Daerah.....	23
5.1 Anggapan Dasar.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24

3.2 Kerangka Konsep.....	26
3.3 Definisi Konsep.....	26
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	27
3.5 Informan atau Narasumber.....	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7 Teknik Analisis Data.....	31
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.9 Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Hasil Penelitian.....	34
4.4.1 Deskriptif Lokasi Pantai Sejarah.....	34
4.4.2 Karakteristik Pantai Sejarah.....	35
4.4.3 Karakter Sosial Masyarakat.....	36
4.4.4 Sejarah Singkat Pantai Sejarah.....	37
4.2 Pembahasan.....	40
4.2.1 Peran Dinas Pariwisata.....	40
BAB V PENUTUP.....	47
5.1 Simpulan.....	47
5.2 SARAN.....	48
Daftar Pustaka.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 Karangka Konsep.....	26
Tabel 3.4 Kategori Penelitian	28
Tabel 3.9 Struktur Organisasi	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.4.1 Jarak Pantai Dari Kota Lima Puluh	34
Gambar 4.4.2 Kebersihan Pantai Sejarah	35
Gambar 4.4.3 Jembatan Cinta	36
Gambar 4.4.4 Pak Ajizi Menceritakan Pantai Sejarah.....	38
Gambar 4.2.1 Wawancara Dengan Masyarakat Wilayah Pantai Sejarah.....	42
Gambar 4.4.4 Wawancara Dinas Pariwisata.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Batu Bara merupakan wilayah hasil pecahan dari kabupaten Asahan Sumatera Utara pada tahun 2006 dan diberi Ibu Kota bernama Lima Puluh. Terletak ditepi pantai selat malaka Kabupaten Batu Bara memiliki luas darat sekitar 904, 96 Km² dengan sebagian daratan terletak di pulau Sumatera dan sebagian kecil di pulau Pandan dan pulau Salah Nama. Dengan letaknya yang berada di pinggir garis pantai, Kabupaten Batu Bara memiliki banyak Wisata Alam terbuka yang menjadi icon wisata pilihan saat memasuki waktu libur sekolah.

Diketahui konsep pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis masyarakat merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Pendekatan seperti ekonomi kreatif dapat menjadi solusi peningkatan ekonomi serta pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya Industri kreatif atau UMKM mempunyai potensi yang besar dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak perlu memaksakan sektor industri sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wahyuningsih & Satriani, *Pendekatan Ekonomi Kreatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, 2019)

Banyaknya Icon Wisata Alam Terbuka di Kabupaten Batu Bara seperti Pantai Sejarah yang merupakan kawasan destinasi wisata alam terbuka yang terletak di Desa Perupuk Kecamatan Perupuk Kabupaten Batu Bara di manfaatkan masyarakat sekitar sebagai penghasilan tambahan mereka. Selain penghasilan dari pengelolaan lahan parkir, masyarakat membentuk UMKM kecil seperti berdagang jajanan. Destinasi wisata ini paling dicari oleh masyarakat sebab banyaknya icon yang cantik untuk pengambilan foto seperti: Hutan Mangrove, Jembatan Cinta, Sepeda Gantung, Panahan, dan Jembatan Gantung.

Dalam pembahasan ini penulis meneliti Otonomi Daerah yakni Dinas Pariwisata Kabupaten Batu Bara yang telah melakukan pendampingan kepada banyak destinasi wisata alam yang terletak di Kabupaten Batu Bara contohnya Pantai Sejarah. Diketahui masyarakat sebanyak 7229 KK yang terletak terpisah ini sebagian memiliki provesi pekerjaan sebagai pedagang makanan, membuka bengkel sepeda motor, bekerja di PT. INALUM dan banyak juga sebagai Perantau. Namun untuk masyarakat yang tinggal disekitar Pantai Sejarah memiliki profesi sebagai nelayan dan sebagaian tak memiliki pekerjaan karena keterbatasan modal, Pengetahuan, dan Kreatifitas. Dalam menyelesaikan permasalahan ini Dinas Pariwisata melakukan Pemberdayaan Masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut guna membantu mereka untuk keluar dari zona keterpurakan mereka yang disebabkan oleh redahnya ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Disporabudpar Dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif Masyarakat Di Wilayah Pantai Sejarah Kabupaten BatuBara?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Peran Disporabudpar Dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif Masyarakat Di Wilayah Pantai Sejarah Kabupaten BatuBara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1 Secara Akademis

Secara akademis penelitian ini diharap mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif Masyarakat Di Wilayah Pantai Sejarah

2 Secara Praktis

Secara Praktis hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat melengkapi bahan pustaka yang sudah ada dan sumbangan pemikiran sebagai bahan acuan disbanding penelitian sejenis atau sebagai bahan pengembangan apabila akan diadakan penelitian lanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan penulisan maka dalam penyusunan skripsi ini dibagi dalam Lima Bab. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada Bab ini dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori data untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang beberapa uraian teoriyis diantaranya, Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan/Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian dan Deskriptif Ringkasan Objek Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan Deskripsi data Narasumber hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Peran Pemerintah

2.1.1 Pengertian Peran Pemerintah

Peran pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan berarti mengukur kinerja terhadap tujuan yang ditetapkan lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini, peran pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan adalah sejauh mana pemerintah menyelesaikan pekerjaannya untuk mencapai standar kinerja dalam program kerja organisasi pemerintah. Baku mutu prestasi kerja yang dimaksud adalah tingkat keseriusan dalam melaksanakan pekerjaan yang diharapkan dari orang yang melaksanakan pekerjaan itu dan sesuai dengan kriteria keberhasilan profesi, sebagai pelayan dan pelaku pekerjaan yang sedang membangun masyarakat.

Melalui pendekatan psikologi sosial, pemerintah daerah mempunyai kaitan yang erat dengan perilaku manusia sebagai salah satu unsur pemerintah daerah dalam struktur organisasi pemerintahan, termasuk perilaku individu dalam kelompok formal dan informal, serta perilaku di dalam dan di luar organisasi pemerintah.

Peran merupakan sebuah tanggung jawab yang dimiliki setiap individu yang hidup. Baik itu peran sebagai orang tua, peran sebagai guru, maupun peran sebagai pemimpin Negara. Kata Peran sendiri telah banyak di simpulkan oleh banyak ahli dengan melihat beberapa sudut pandangnya masing - masing seperti :

- (a) Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka Dia menjalankan suatu peran. Sebagai struktur social meliputi: norma - norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, dan apa yang dapat di lakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai Organisasi.
- (b) Menurut Veithzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.
- (c) Menurut Ali (2000:304) peran adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu peristiwa. Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. (Rehawarin, 2018)
- (d) Menurut Poerwadarminta, peran dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat.
- (e) Menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep

dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. (Windasai, said, & Hayati, 2021)

Peran memiliki beberapa jenis menurut ahli Bruce J. Cohen, jenis peran terbagi menjadi beberapa komponen seperti :

- (a) Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul - betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- (b) Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- (c) Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya. (Rehawarin, 2018)

Definisi Pemerintah yang dikutip dari buku yang ditulis Jum angraini (2012) pemerintah berasal dari bahasa Yunani dari kata “cratein”. Dalam bahasa inggris, istilah pemerintah disebut dengan Government, yang berasal dari bahasa Latin Gubernaculun yang artinya kemudi. Menurut ahli Van Poelje Jum Anggraini (2012) yang di namakan pemerintah dalam arti luas adalah fungsi yang meliputi tindakan, perbuatan dan keputusan oleh alat - alat pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah (administrasi). Sedangkan

pemerintah dalam arti sempit merupakan organ/badan/alat perlengkapan negara yang disertai pemerintahan ataupun tugas - tugas memerintah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berarti bahwa pemerintah daerah sendiri yang mengatur dan menyelenggarakan urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi, dan tugas pembantuannya bertujuan untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bantuan dengan meningkatkan dan melayani kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pengaruh dan peran, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan ciri-ciri demokrasi, kesetaraan, keadilan, keistimewaan dan kedaerahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran pemerintah daerah telah berubah dari pengelolaan perikanan menjadi kegiatan pengelolaan yang memberikan pengetahuan, informasi dan pelatihan. Kelembagaan yang terbentuk diharapkan dapat mendongkrak modal sosial para nelayan sehingga semakin mempunyai kekuatan sosial dan kemandirian ekonomi. Pendampingan dan pelatihan sangat diperlukan, hal ini merupakan peran penting pemerintah dalam menciptakan komunitas nelayan yang lebih mandiri.

Buku yang ditulis oleh (Rahman2018) menyebutkan bahwa Pemerintah secara Etimologis dari kata Yunani “Kebenaran atau Nahkoda Kapal” dalam pembahasan lain ia mengartikan pemerintah dari kata perintah yang memiliki empat unsur yakni :

- (a) Ada dua belah pihak yang saling terikat.
- (b) Kedua belah pihak memiliki hubungan kontraktual.
- (c) Pihak yang memerintah memiliki kewenangan.
- (d) Pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah suatu organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang mempunyai tanggung jawab, kekuasaan dan pandangan ke depan. Pemerintah selalu berorientasi pada pembangunan negara. Sebagaimana dikatakan Amien Rais, pemerintah adalah sekelompok orang yang secara kolektif mempunyai tanggung jawab terbatas dalam menjalankan kekuasaan. Hal ini berbanding terbalik dengan pendapat (Agustino2011) yang menartikan pemerintah adalah organisasi yang menjelaskan peran dan fungsi Negara. Agustino seakan-akan menyamakan antara Negara dengan pemerintah. Padahal dalam ilmu politik klasik menjelaskan jika ruang lingkup Negara jauh lebih luas ketimbang pemerintah. Negara meliputi Pemerintah, Rakyat, Wilayah, dan Kedaulatan. Kutipan Muhtar Habodin (2015) mengartikan pemerintah adalah tindakan kehendak yang dapat mengubah kebijakan. (Rahman, 2018).

2.1.2 Jenis Peran Pemerintah

Menurut Arif, Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu :

- (a) Peran pemerintah sebagai regulator, Peran pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan - peraturan

dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah member acuan dasar yang selanjutnya di terjemahkan oleh masyarakat sebagai instrument untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat.

- (b) Peran pemerintah sebagai dinamisator, Pemerintah sebagai dinamisator yaitu mengerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong) dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui Tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.
- (c) Pemerintah sebagai fasilitator, Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjambatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebaai fasilitator pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan atau permodalan.
- (d) Pemerintah sebagai katalisator, Pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat penembangan

potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. (Raintung, Sabrina, & Sumampow, 2021)

2.1.3 Fungsi Pemerintah

Fungsi pemerintah sangatlah luas dan universal. Hal ini diperkuat dengan pendapat Anthony Giddens (1999) yang menyebutkan bahwa fungsi pemerintah juga luas dalam kehidupan warganya. Ryaas Rasyid membagi tujuh pokok Pemerintah:

- (a) Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara - cara kekerasan.
- (b) Memelihara ketertiban dengan terjadinya gontok - gontok diantara warga masyarakat. Menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- (c) Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun melatarbelakangi perbedaan mereka.
- (d) Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang - bidang yang tidak mungkin di kerjakan oleh pemerintah.
- (e) Melakukan upaya - upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu Rakyat kurang mampu, Menyantuni anak difabel, Jompo, Anak terlantar, dan menampung gelandangan disektor kegiatan yang

produktif dan semacamnya.

- (f) Menetapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas seperti menghentikan laju medorong penciptaan lapangan kerja yang secara langsung.
- (g) Menetapkan kebijakan untuk memelihara Sumber Daya Alam dan Lingkungan seperti: Air, Tanah dan Hutan. (Rahman, 2018).

2.2 Pemberdayaan

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemberdayaan menurut Suhari (2006) adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik , ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Begitu pula dengan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Handini dkk (2019) mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community-based development). Terkait dengan pemahaman ini

pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu dalam bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Dalam buku yang ditulis Wasistiono (1998:46) yang mengutip pernyataan dari Carlzon dan Macauley menjelaskan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai memberbaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan member orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide - idenya, keputus - keputusannya, dan tindak - tindakannya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan yang menjadikan masyarakat mengambil inisiatif untuk memperbaiki situasi dan kondisinya melalui suatu proses aksi sosial. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat terjadi bila masyarakat itu sendiri ikut serta. (Raintung, Sabrina, & Sumampow, 2021).

Ke-Ikut sertaan atau partisipasi berguna untuk meningkatkan kemampuan pemberdayaan kepada setiap individu yang mengikuti pemberdayaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam buku yang ditulis (Hajar, Tanjung, & Tanjung, 2018) yang mengutip Wajir mengemukakan bahwa partisipasi dimaknai dengan terlibatnya beberapa individu yang secara sadar dalam interaksi sosial dalam keadaan tertentu. Adapun prinsip Partisipasi yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Departement For International Development* (DFID) (Seumampow, 2004) adalah :

a. Cakupan.

Semua orang atau Wakil – Wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil suatu keputusan atau proyek pembangunan.

b. Kesetaraan dan Kemitran (*Equal Partnership.*)

Dalam setiap individu memiliki keterampilan yang telah melekat sejak lahir, kemampuan dan prakarsa lalu memiliki hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna terbentuknya dialog tanpa mengukur jenjang dan struktur setiap pihak.

c. Transparansi.

Setiap orang harus mampu mengembangkan komunikasi dan iklim komunikasi yang terbuka dan kondusif agar mampu menciptakan dialog.

d. Kesetaraan Kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership.*)

Berbagai pihak yang terkait harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

e. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responbility.*)

Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan (*Sharing Power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah selanjutnya.

f. Pemberdayaan (*Empowerment.*)

Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan aktif dalam setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi sesuatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

g. Kerjasama.

Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumberdaya manusia.

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan masyarakat sendiri menurut Mardikanto terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

- (a) Perbaiki Kelembagaan (*better institution*)
- (b) Perbaiki Usaha (*better business*)
- (c) Perbaiki Pendapatan (*better income*)
- (d) Perbaiki Lingkungan (*better environment*)
- (e) Perbaiki Kehidupan (*better living*)
- (f) Perbaiki Masyarakat (*better community*)

2.2.3 Prinsip Pemberdayaan

Prinsip - Prinsip dalam program pemberdayaan masyarakat, beberapa ahli mengemukakan bahwa terdapat empat prinsip yang harus dilakukan yakni :

- (a) Prinsip Kesetaraan, atau kesejajaran berarti persamaan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga penyelenggara program pemberdayaan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang ingin dikembangkan adalah hubungan kesetaraan,

mengembangkan mekanisme kesatuan antara berbagai pengetahuan, pengalaman dan satu sama lain.

- (b) Prinsip Partisipasi, program pemberdayaan masyarakat yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri.
- (c) Prinsip Keswadayaan, menghormati dan mengutamakan kemampuan masyarakat untuk membantu pihak lain. Mereka mempunyai kemampuan untuk mengetahui secara menyeluruh hambatan-hambatan usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, mempunyai kerja dan kemauan, serta norma-norma sosial yang dianut sejak lama.
- (d) Prinsip Berkelanjutan. Secara bertahap, program tersebut mampu memberikan pemahaman, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan kepada setiap orang yang mengikuti program aksi pemberdayaan. Sehingga individu nantinya dapat melakukan aktivitasnya secara mandiri. (Habib, 2021).

2.2.4 Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan Masyarakat dibentuk dengan sebuah tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, menurut Soekanto dalam (Daulay, 2018) mengemukakan tahapan yang terdiri dari :

- (a) Tahap Persiapan

Dalam tahap Persiapan petugas sangat atau tenaga pemberdayaan

masyarakat sangat penting supaya efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik.

(b) Tahap Pengkajian “*Assessment*”

Tahap ini dapat dilakukan secara individual melalui kelompok - kelompok dalam masyarakat. Petugas harus mengidentifikasi masalah kebutuhan yang di rasakan “*feel needs*” dan juga sumber daya yang di miliki klien.

(c) Tahap Perencanaan

Alternatif Program atau Kegiatan, Petugas sebagai agen perubahan secara participatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

(d) Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Agen Perubahan membantu masing - masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

(e) Tahap “Implementasi” Program dan Kegiatan

Dalam tahap ini kerjasama antara petugas dengan masyarakat merupakan hal yang penting dalam tahapan ini karena kadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.

(f) Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya

dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek terbentuk suatu system komunitas untuk pengawasan secara internal.

(g) Tahap Termisi

Tahap Termisi merupakan tahap putusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek segera berhenti. Dengan artian, masyarakat telah mampu mengatur dirinya untuk hidup lebih baik dengan mengubah situasi kondisi yang sebelumnya.

2.2.5 Relasi Pemberdayaan Dengan Pembangunan Ekonomi

Koneksi Pemberdayaan masyarakat tentu saja berkaitan dengan pengembangan sektor perekonomian masyarakat. Pembangunannya sendiri terbagi dalam pembangunan fisik, meliputi pembangunan infrastruktur bangunan pasar dan jalan menuju ke bangunan tersebut. Jika bangunan dan infrastruktur yang menuju kesana dalam kondisi baik, maka akan mendorong aktivitas pasar dan dunia usaha sehingga mempercepat perkembangan pembangunan ekonomi daerah. Sebaliknya jika kondisi bangunan dan infrastruktur pasar tidak baik maka akan menjadi hambatan bagi perkembangan pembangunan perekonomian daerah tersebut.

Perkembangan pembangunan ekonomi nonfisik dapat ditunjukkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang tersebut. Ketika peraturan berpihak pada masyarakat luas dan memudahkan dunia usaha serta menciptakan suasana yang kondusif bagi semua kalangan dunia usaha, baik

perusahaan besar, menengah, usaha kecil, dan badan lainnya, maka pembangunan ekonomi akan berkembang pesat. Sebaliknya, jika pembangunan ekonomi hanya menguntungkan segelintir pihak, maka akan timbul hambatan terhadap pembangunan ekonomi. (Maryani & Roselin, 2019).

3.1 Ekonomi Kreatif

3.3.1 Pengertian Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif diartikan sebagai cabang ekonomi yang timbul dari penerapan kreativitas, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk menciptakan kesejahteraan dan kesempatan kerja dengan menciptakan dan menggunakan kreativitas dan kecerdikan individu. (Daulay, 2018)

Pengertian lain dari ekonomi kreatif adalah suatu konsep yang memperkuat informasi dan kreativitas dengan didukung gagasan dan keluasan pengetahuan tentang sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama kegiatan ekonomi di era ekonomi baru ini.

Lewat buku yang berjudul "*Creative Economy, How People Make Money from Ideas*" John Howkins memperkenalkan istilah ekonomi kreatif untuk pertama kali. Menurut Jhon, hanya dengan bermodalkan gagasan yang diciptakan oleh seseorang yang memiliki jiwa kreatif, maka orang tersebut mampu memperoleh income yang layak. Howkins menjelaskan bahwa kreativitas seseorang muncul apabila orang tersebut berkata, mengerjakan dan membuat suatu hal yang baru, baik dalam hal menciptakan sesuatu yang pada awalnya tidak ada maupun memberikan karakter baru pada hal yang sudah

ada sebelumnya. Secara lebih lugasnya, Howkins memaparkan bahwa ekonomi kreatif merupakan kegiatan dimana input dan output nya merupakan gagasan.

Ahli teori pada pertumbuhan ekonomi klasik mengemukakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. (Haya & Tambunan, 2022)

3.3.2 Manfaat Ekonomi Kreatif Untuk Masyarakat

Keunggulan bisnis sektor UMKM adalah bertambahnya 4.444 produk produksi dalam negeri. Di tambah lagi Produk-produk yang ada saat ini tidak hanya mampu menembus pasar dalam negeri, namun produk dalam negeri juga mampu menembus pasar internasional. Produk lokal banyak diminati masyarakat dari dalam dan luar Negeri. Misalnya kerajinan tangan. Kerajinan tangan di Indonesia juga banyak yang dikenal di luar negeri. Oleh sebab itu tidak dapat dipungkiri bahwa sektor UMKM secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi orang. Tuntunya Hal ini dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran yang ada saat ini.

UMKM merupakan sebuah solusi untuk masyarakat kelas bawah, dan menengah. Sebab modal yang harus di keluarkan untuk usaha ini tidak lah mahal dan tak sulit untuk di dapatkan. Saat ini juga sudah banyak instansi pemerintahan membanru untuk memberikan bantuan Dana modal dalam jumlah kecil agar masyarakat dapat membuka usahanya sendiri. (Kadeni & Srijani, 2020)

3.3.3 Manfaat Ekonomi Kreatif Untuk Negara

Ketika krisis keuangan melanda Indonesia pada tahun 1998, perusahaan kecil dan menengah bertahan dibandingkan perusahaan besar. Hal ini dikarenakan sebagian besar usaha kecil tidak terlalu bergantung pada modal besar atau pinjaman mata uang asing. Oleh karena itu, dampak krisis jika terjadi fluktuasi nilai tukar paling besar terjadi pada perusahaan besar yang sebagian besar menggunakan pinjaman mata uang asing.

Terbuktinya UMKM dapat memberikan manfaat untuk suatu Negara maka tak lazim bagi suatu Negara tersebut untuk memberikan perhatian khususnya. Dengan tiga alasan mengapa Negara wajib memberikan dorongan kepada usaha kecil yang ada untuk terus berkembang :

- (a) Alasan pertama adalah bahwa perusahaan kecil pada umumnya mampu merekrut dan menghasilkan pekerja yang sangat produktif.
- (b) Kedua, produktivitas seringkali dicapai melalui investasi dan adopsi teknologi.
- (c) Ketiga, perusahaan kecil tampaknya memiliki fleksibilitas lebih besar dibandingkan perusahaan besar. (Kadeni & Srijani, 2020).

4.1 DISPORABUDPAR

4.4.1 Pengertian DISPORABUDPAR

DISPORABUDPAR adalah singkatan dari Dinas Pemuda Olahraga Budaya Pariwisata. Merupakan salah satu instansi pemerintah yang terletak di Kabupaten Batu Bara desa Perpuk. Instansi ini membantu Pemerintahan Kabupaten Batu Bara untuk mengelola sebagian sumber daya baik Alam

maupun Manusia yang dimiliki Kabupaten Batu Bara. Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai instansi Dinas Pariwisata Kabupaten Batu Bara dalam membantu pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mengelola Sumber Daya Alam yang berada di Kabupaten BatuBara.

4.4.2 Arti Otonomi Daerah Menurut Ahli

Otonomi menurut Cambridge Dictionary of English (1995) adalah hak sekelompok orang untuk mengatur atau mengatur kegiatannya sendiri (otonomi adalah hak sekelompok orang untuk mengurus dirinya sendiri atau hak untuk mengatur kegiatannya sendiri). Jika secara leksikografis (kamus) arti kata otonomi merujuk pada kenegaraan/pemerintahan, maka menurut sebagian ahli kedaulatan dapat dikatakan sebagai otonomi negara. Namun konsep otonomi negara belum banyak digunakan. Otonomi desa (otonomi milik desa) dan otonomi daerah (otonomi milik daerah) sering digunakan.

Menurut Fasli Jalal, (1997), “Otonomi Daerah adalah Wewenang untuk mengambil segala keputusan yang berhubungan dengan penggunaan berbagai resources yang dimiliki jenjang pemerintahan yang lebih rendah karena pemberian dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi.

Otonomi daerah Menurut Sadu Wasistiono (1999), pada dasarnya adalah Hak suatu kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara bebas. Koswara (2000), mengemukakan bahwa otonomi daerah pada hakekatnya merupakan penerapan konsep “areal division of power” yang membagi kekuasaan suatu negara secara vertikal.

Dalam sistem ini, kekuasaan negara akan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak. (Sufianto, 2020).

4.4.3 Peraturan Daerah

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berisi tentang pemerintah daerah mengatakan bahwa Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan - pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wardani, 2021)

Implementasi kebijakan Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Ke - pariwisata Daerah tahun 2014 - 2029 pada Pengembangan wisata alam terbuka Pantai Sejarah berbasis masyarakat dalam meningkatkan penghasilan pendapatan asli daerah di Kabupaten Batu Bara. (Faizal, 2023).

5.1 Anggapan Dasar

Adapun anggapan dasar dalam penelitian ini yaitu :

1. Terdapat pola pembinaan terhadap masyarakat di wilayah Pantai Sejarah yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Batu Bara dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif Masyarakat Di Wilayah Pantai Sejarah Kabupaten Batu Bara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis Penelitian Kualitatif menurut ahli seperti :

(a) R. Bogdan dan SK. Biklen dalam Ghony dan Almansur (2021).

Mengartikan Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkarakterisasi dan mengevaluasi fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan pemikiran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dikenal dengan penelitian kualitatif. Untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu, pendekatan kualitatif membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif. Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Untuk itu, hasil dari riset kualitatif memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. (Arsyam, 2021)

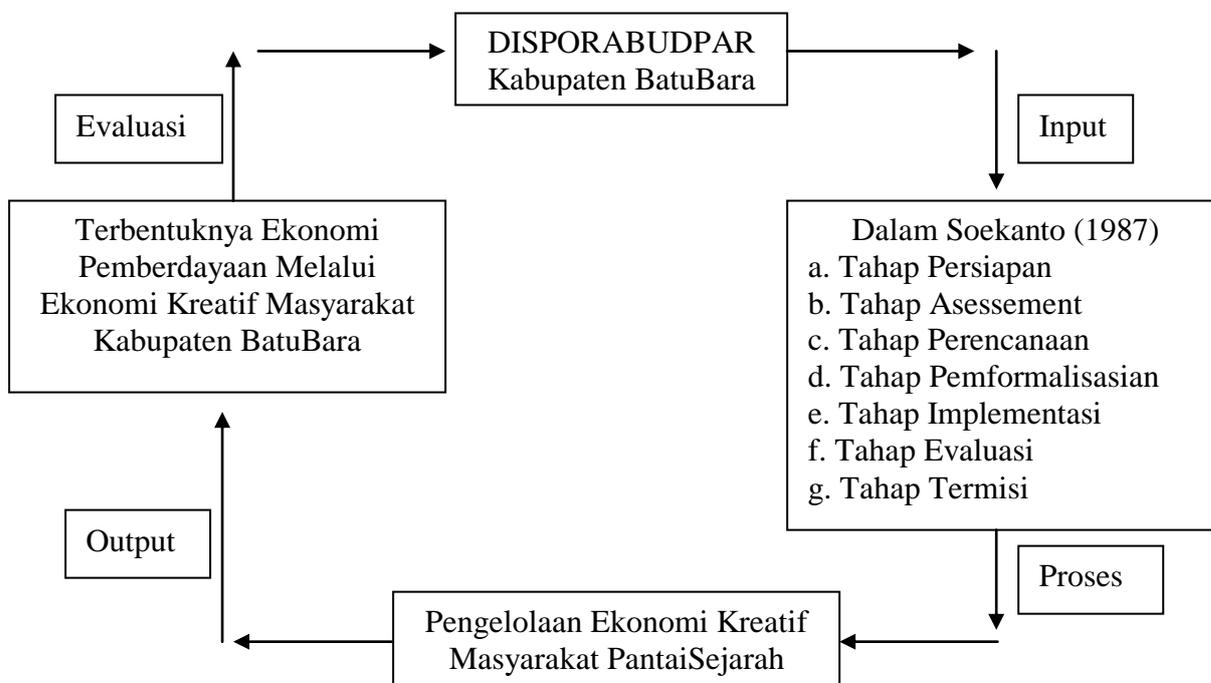
(b) Metode penelitian kualitatif menurut Sugiono (2011) sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat

kualitatif.

- (c) Dalam buku yang berjudul *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*” Arikunto (2002), menjelaskan bahwa jika penelitian yang mengumpulkan data dan penafsiran hasilnya tidak menggunakan angka, maka penelitian tersebut dinamakan penelitian kualitatif. Kendati demikian, bukan berarti penggunaan angka tidak diperbolehkan dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini, angka digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga (menyebutkan jumlah anggota keluarga, menunjukkan pengeluaran belanja sehari-hari, dll). Dalam hal ini penggunaan angka tidak diperbolehkan jika rumus statistik digunakan dalam pengumpulan dan interpretasi data, (Awaludin & Ramdani, 2022).
- (d) Dalam buku yang ditulis Creswel mengenai konsep dasar penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami mengeksplorasi dan memahami makna yang diperoleh dari beberapa individu yang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. Dalam buku ini Creswel (2009) menjelaskan proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur - prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema - tema yang khusus ke tema umum, dan menafsirkan makna data, (Kusumastuti & Khoiron, 2019)

3.2 Kerangka Konsep

Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2 Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep mencakup istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak sejumlah kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial dan secara abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Konsep yang digunakan untuk penelitian yang akan diteliti diambil dari deskripsi di atas. Peran DISPORABUDPAR Dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif Masyarakat Di Wilayah Pantai Sejarah Kabupaten Baru Bara menggunakan konsep sebagai berikut :

- (1) Ekonomi Kreatif menurut Haya dalam Daulay (2018) sebagai

cabang ekonomi yang timbul dari penerapan kreatifitas, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk menciptakan kesejahteraan dan kesempatan kerja dengan menciptakan dan meningkatkan kreatifitas dan kecerdikan individu.

- (2) Pemberdayaan Masyarakat menurut Raintung dalam Suharto (2006:59) sebuah proses dan tujuan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat terutama individu - individu yang mengalami kemiskinan.
- (3) Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Masyarakat adalah proses peningkatan ekonomi melalui penerapan kreatifitas, keterampilan dan kemampuan pada kelompok lemah dalam masyarakat. Terutama pada individu - individu yang mengalami kemiskinan.
- (4) Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Ke - pariwisata Daerah Tahun 2014 - 2029 pada Pengembangan wisata alam terbuka Pantai Sejarah berbasis masyarakat dalam meningkatkan penghasilan pendapatan asli daerah di Kabupaten Batu Bara.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi berhubungan sebagaimana saubjek dan objek penelitian ini. Katerogi yang ditentukan merupakan campuran dari beberapa indikator sesuai dengan terori yang di gunakan dalam penelitian ini.

NO.	KATEGORISASI	INDIKATOR
1.	Implementasi Pendampingan	Menurut daulay dalam Soekanto (1987:63) terdapat Indikator Implementasi pendampingan yaitu : a. Tahap Persiapan b. Tahap Asessment c. Tahap Perencanaan d. Tahap Pem-formalisasi e. Tahap Implementasi f. Tahap Evaluasi g. Tahap Termisi
2.	Implementasi Perda Kabupaten BatuBara	Peraturan Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Ke Pariwisata Daerah Tahun 2014 – 2019

Tabel 3.4. Kategori Indikator Penelitian

3.5 Informan atau Narasumber

Informan atau Narasumber menurut Sugiyono adalah orang di wawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek

penelitian. Menurut (Fajar, 2021) ada Kriteria - Kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu:

- (a) Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayatinya.
- (b) Mereka yang masih tergolong berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
- (c) Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta memberikan informasi.
- (d) Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
- (e) Mereka yang mulanya tergolong cukup asing dengan penulis sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau Narasumber.

Untuk mendapatkan dan melengkapi data, maka peneliti menggunakan narasumber atau informan untuk melengkapi data yang sudah ada. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- (a) Karyawan Dinas Pariwisata Bidang Pemberdayaan.
- (b) Kepala Pengurus Pantai Sejarah.
- (c) Dua Masyarakat yang tinggal di kawasan Pantai Sejarah

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2018 hal 72), Nirwan and

Izharsyah (2022) Teknik atau metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, wawancara adalah pertemanan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara Tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Menurut Syafruddin dalam Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik (2015), Ratnaningrat Dkk (2023), bahwa pengumpulan data penelitian memang perlu dipantau agar data yang di peroleh terjaga tingkat validasi dan relibitasnya.

Dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data adalah pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik wawancara untuk memberikan informasi agar data yang diperoleh valid. Untuk mendapatkan data dan Informasi, peneliti harus mengumpulkan dari orang - orang yang terlibat kegiatan penelitian. Untuk tujuan ini, penelitian menggunakan metode pengumpulan data berikut.

a) Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pernyataan atau dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen - dokumen, baik dokumen

tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh. Data yang diambil bias diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lain yang mendukung dalam analisis data. Dokumen elektronik seperti pengambilan dokumentasi di lapangan saat penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono; (2018, hal. 335) dalam Nirwan and Izharsyah (2022) yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit - unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Mujahiddin,(2018) dalam Nirwan and Izharsyah (2022) teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data induktif, Analisis Data Induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta - fakta khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah - langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data
- b. Reduksi Data

c. Display Data.

Dapat diisimpulkan bahwa teknik data adalah membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri melalui data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

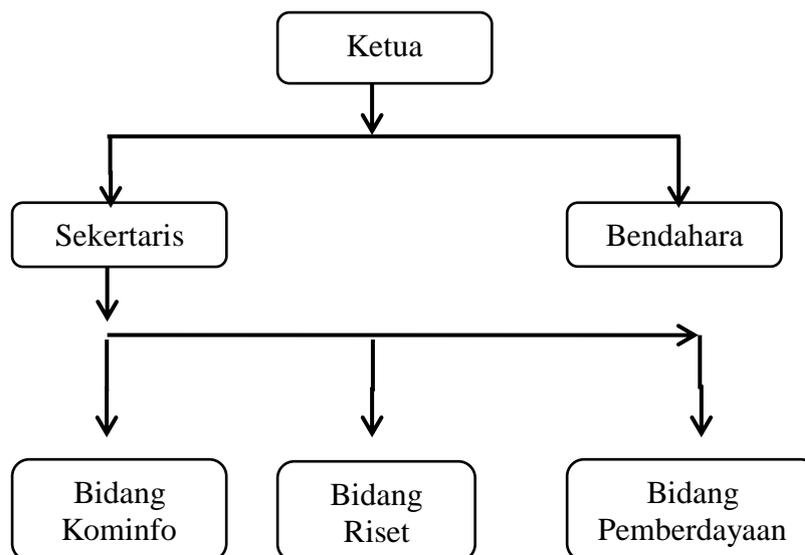
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Batu Bara Kecamatan Perupuk dan wisata alam terbuka Pantai Sejarah di Desa Perupuk Kabupaten Batu Bara. Dengan jangka waktu penelitian hingga bulan Mei 2024.

3.9 Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan didua tempat yakni Kantor dari Dinas Pariwisata yang terletak di Jl. Besar Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara, Sumatera Utara. Diketahui Struktural Disporabudpar meliputi :

Tabel 3.9 Struktur Organisasi



Sumber : Peta Struktur Dinas Pariwisata

Yang mana diketahui telah melakukan tugas sesuai bidangnya masing – masing dengan semaksimal mungkin. Dan peneliti juga mendatangi langsung rumah kediaman bapak Ajizi setelah mendapatkan persetujuan beliau yang berada alamat didesa perupuk Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara. Diketahui rumah kediaman beliau hanya berjarak beberapa kilometer dari Kantor Disporabudpar terletak sebelah kiri dari jalan besar desa perupuk. Untuk structural kepengurusan tidak dimiliki karena kepala pengelola hanya pengakuan dan penghargaan yang diberikan masyarakat kepada Pak Ajizi mengingat beliaulah orang yang memiliki ide gagasan untuk membuka lokasi wisata alam terbuka pantai sejarah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

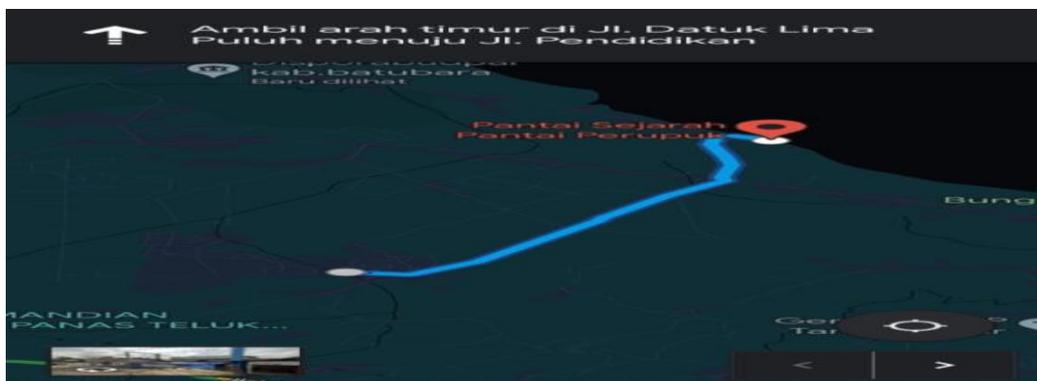
Pada Bab ini tertuang beberapa hasil penelitian penulis yang dilakukan dengan teknik wawancara kepada dua oknum. Seperti yang diketahui bahwa teknik wawancara merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada oknum guna mendapatkan informasi yang ingin di dapat. Selain itu, teknik wawancara juga dapat digunakan untuk mencari kebenaran dari informasi – informasi yang beredar didalam masyarakat.

4.1 Hasil Penelitian

4.4.1 Deskriptif Lokasi Pantai Sejarah

Pantai sejarah merupakan wisata alam terbuka yang terletak didesa perupuk kabupaten BatuBara. Jarak Pantai Sejarah dari Kota LimaPuluh Hanya berjarak 20 KM jarak ini dapat ditempuh dalam waktu 31 Menit/Jam menggunakan kendaraan bermotor dan 35 Menit/Jam.

Gambar 4.4.1 Jarak Pantai Sejarah Dari Kota LimaPuluh



Sumber : <https://maps.app.goo.gl/94KdotqAVefQwoh7>

Jarak 10,8 Km dari LimaPuluh Ke Pantai Sejarah dapat ditempuh dengan waktu 22 dan 30 Menit disebabkan kondisi infrastruktur jalan yang bagus sehingga untuk menempuh perjalanan para pengunjung dapat melakukannya dengan sedikit resiko. Selama dalam perjalanan pula, pengunjung akan disajikan dengan rutinitas menarik masyarakat sekitar seperti menanam padi dan menjemur ikan.

Ketika hendak memasuki pantai yang berada disebelah kanan, pengunjung harus terlebih dahulu membayar parkir kendaraannya sebesar Rp. 5000/Roda Dua dan Rp 8000/Mobil Pribadi hingga sampai dilokasi parkir pengunjung tinggal memarkirkan kendaraan sesuai dengan arahan dari pengurus lahan parkir.

4.4.2 Karakteristik Pantai Sejarah

Pantai Sejarah Merupakan Sebuah lokasi wisata alam terbuka yang terletak di Desa Perupuk kecamatan LimaPuluh Kabupaten BatuBara. Nama ini diambil oleh warga setempat mengingat masih terdapat beberapa penginggalan Belanda yang masih kita dilihat disana. Selain itu juga pantai sejarah merupakan sebuah pantai yang bersih dan juga indah. Hal ini dapat sama – sama kita lihat pada gambar di bawah.



4.4.2 Kebersihan Pantai Sejarah

Disini kita juga dapat melihat dan merasakan bagaimana jalan dilaut dengan tiket masuk Rp.5000/Orang kita dapat menaiki jembatan yang menghubungkan daratan dan lautan ini. Selain itu kita juga dapat mengambil beberapa foto yang dapat dijadikan koleksi sebab didalamnya terdapat beberapa icon tempat fotografer dan itu free.



Gambar 4.4.3 Jembatan Cinta

4.4.3 Karakter Sosial Masyarakat

Selain dari tingkat kebersihan dan juga keindahannya, jika anda berkunjung ke Pantai Sejarah yang ada di Desa Perupuk Kecamatan

LimaPuluh Kabupaten BatuBara ini selain mata anda di manjakan dengan pesona alam yang indah dan tempat yang bersih. para pengunjung juga akan disuguhkan dengan keramah dari masyarakat sekitar sehingga takkan menimbulkan rasa cemas terhadap pungli, kehilangan kendaraan, Dll. Meskipun begitu penulis menyarankan yang namanya di tempat umum kita tetap harus memperhatikan barang bawaan kita sendiri agar lebih aman.

Masyarakat sekitar Pantai Sejarah mayoritas beragama Muslim dan bersuku melayu dengan karakteristik Bahasa yang berujung dengan huruf “O” jadi ketika mereka menggunakan Bahasa adat anda pasti akan merasa lucu deh ketika mendengarnya. Tapi meskipun begitu, mereka tetap bisa menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar kok. Mereka melakukan itu hanya kepada sesama suku atau anak – anak mereka guna menjaga Bahasa yang menjadi ciri khas suku mereka.

Masyarakat di daerah Pantai Sejarah berprofesi sebagai nelayan, oleh sebab itu tak heran jika pola hidup masyarakat disana sangat sederhana. Pola pikir para orang tua disana terutama adalah anak. Jadi mau bagaimanapun bangunan yang mereka tinggali asalkan bisa untuk berteduh dari panas dan hujan mereka tidak peduli yang penting anak mereka sukses dan dapat membantu mereka disaat tua nya.

4.4.4 Sejarah Singkat Pantai Sejarah

Terbentuknya wisata alam terbuka ini adalah hasil kerjasama sekelompok masyarakat bersama dengan Dinas Perikanan yang ada di

Kabupaten BatuBara. Pada mulanya masyarakat yang diketahui bernama Pak Ajizi ingin membangun sebuah jalan yang digunakan untuk bisnis perikanan yang ada didesa gambus laut kabupaten BatuBara bekerjasama dengan Dinas Perikanan yang menggunakan Dana pemerintah kabupaten BatuBara. Namun pada saat itu Pak Ajizi meminta kepada Dinas perikanan untuk tidak mematikan hak patennya agar suatu saat jika terjadi masalah Ia tetap bisa mengalihkan pembangunannya.

Pada saat jalan selesai terbangun, ternyata beberapa kelompok masyarakat berada didesa gambus laut melakukan protes atas jalan tersebut karena dianggap mempermudah adanya tindak pencurian terhadap hasil tangkapan dan budidaya mereka. Maka dengan adanya tindakan tersebut Pak Ajizi sangat menyayangkan tindakan itu dan kemudian mengalihkan hak pmbangunannya ke desa perupuk untuk membangun kawasan wisata alam yang kemudian dinamakan pantai sejarah.



Gambar 4.4.4 Pak Ajizi Menceritakan Sejarah Pantai Sejarah

Dalam pembentukannya Pak Ajizi mengatakan bahwa Ia tidak bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten BatuBara melainkan bekerja sama dengan masyarakat sekitar menggunakan hak nya untuk mengelola hutan yang didukung Dinas Perikanan Kabupaten BatuBara. Melihat masyarakat yang sangat antusias dengan adanya pembangunan wisata alam tersebut, Pak Ajizi mulai mengajak beberapa Dinas yang ada dikabupaten BatuBara seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial untuk berpartisipasi dalam pembangunan Pantai Sejarah menggunakan Dana Kabupaten. Ia (Pak Ajizi) menggunakan dana – dana yang diperoleh untuk membangun beberapa icon wisata untuk lebih memperindah dan mampu memberikan daya tarik pengunjung seperti: Sepeda Gantung, Jembatan Gantung, Panahan dan Hutan Mangrove.

Setelah terbentuk dan bertambahnya Icon wisata yang dimiliki Pantai Sejarah, guna menarik dan menginformasikan keberdadaannya Pak Ajizi meminta kepada Dinas Pariwisata agar membantu untuk menyebarluaskan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Web, Dll. Kemudian Dinas Pariwisata juga bantu mem Follow-Up berita tersebut ke Dinas Sosial yang kemudian sama – sama mereka menyebarkannya. Sejak saat itu Nama destinasi Pantai Sejarah terkenal dan banyak didatangi oleh banyak pengunjung.

Hingga tahun 2020 yang mana kita ketahui adalah masa – masa Covid – 19 menjadi tahun yang menyebabkan penurunan pendapatan mereka, Pak Ajizi sempat menaikkan harga parker yang bermula Rp.

3000 untuk kereta Rp. 5000/ Mobil menjadi Rp. 5000/Kereta dan Rp. 8000/Mobil hal ini dilakukan beliau untuk tetep dapat memenuhi penghasilan masyarakat meskipun hanya untuk makan saja. Melihat hal tersebut Dinas Pariwisata bersama Dinas Sosial meminta agar harga parkir tetap pada nilai awal kepada Pak Ajizi. Pak Ajizi menyepakati hal tersebut dengan catatan kekurangan Rp. 5000 yang mereka alami di tutupi atau diambil dari anggaran Dinas. Adanya permintaan tersebut kemudian disepakati oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Peran Dinas Pariwisata

Dari hasil penelitian yang dilakukan menggunakan teknik Wawancara kepada Dinas Pariwisata. Penulis mendapati bahwa Dinas Pariwisata telah melakukan perannya untuk mengembangkan tempat wisata yang ada di Batu Bara. Pantai Sejarah menjadi bukti salah satu destinasi yang mana Dinas Pariwisata telah melakukan Perannya sebagai Dinas yang menaungi segala destinasi wisata di Batu Bara. Mereka memberikan bantuan Dana untuk memperindah Pantai Sejarah agar banyak pengunjung yang datang sehingga masyarakat mendapat penghasilan dari pesatnya pengunjung tersebut. Diketahui dari Pak Akhyar salah seorang pegawai didinas tersebut bahwa Dinas Pariwisata membantu pantai sejarah dengan memerikan bantuan Dana kepada pengelola pantai sejarah yang kemudian memberikan gambaran icon/wahana wisata yang akan dibuat serta membantu Pantai Sejarah melalui

Komunikasi Informasi Dinas Pariwisata membantu untuk menyebarluaskan keindahan yang dimiliki pantai sejarah melalui media online seperti di akun Instagram DISPRABUDPAR Kabupaten Batu Bara.

Hal ini di buktikan juga oleh argument Dua Orang Warga yang tinggal di wilayah pantai sejarah mengenai Peran Dinas Pariwisata terkait peningkatan ekonomi kreatif masyarakat di Pantai Sejarah yaitu Ibu Rosmiati Mengatakan bahwa :

“Selamo ini tak pernah Dinas Pariwisata tu mengadakan kegiatan untuk masyarakat disini. Kecuali uang tu membantu mengasi kan uang untuk membuat macam jembatan cinto, Hutan Mangrove tu, baru flying fox, samo yang baru di bangun tu ado ruang baco samo ruang komputer untuk anak – anak”

dengan adanya jawaban tersebut, maka selama ini masyarakat yang tinggal di wilayah Pantai Sejarah tidak pernah merasakan dampak langsung terkait dengan Peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat di wilayah Pantai Sejarah Kabupaten Batu Bara. Namun meskipun begitu masyarakat yang tinggal di wilayah Pantai Sejarah dapat bertahan hidup dengan membangun UMKM secara mandiri. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Khadijah :

“Jadi memang dek, selamo kami tinggal di mai tak pernah kami merasokan Dinas Pariwisata tu mengasikan peran pemberdayaan nyo samo kami secara langsung. Selamo ni, semo nyo langsung untuk pembangunan wahana disini. Tapi meskipun gitu totap la kami bersyukur sobab dengan indah, cantik, rapihnya wahana yang ado di sini pengunjung tu jadi ramai. A kami untuk cai uang tambahan kami buko la jualan macam Ibu jual gorengan samo minuman es”



4.2.1 Wawancara Dengan Masyarakat Wilayah Pantai Sejarah

Berdasarkan indikator – indikator Impelementasi pendampingan yang harusnya dilaksanakan diketahui dari Pak Akhyar Bahwa Dinas Pariwisata hanya melaksanakan Tahapan – Tahapan seperti

a. Adanya Tahap Persiapan,

Tahap perisapan merupakan tahapan yang paling untuk dilaksanakan, karena pada tahap ini semua hal yang diperlukan dalam melaksanakan program kerja di susun. Seperti pada pemberdayaan yang dilakukan Dinas Pariwisata kepada Pantai Sejarah, Pada tahap persiapan ini Dinas Pariwisata melakukan penyediaan Dana bantuan untuk tempat wisata yang ada di Kabupaten BatuBara khusunya untuk Pantai Sejarah yang menjadi Icon wisata alam yang paling dicari ketika musim libur.

Pak Akhyar menjelaskan bahwa

“Pada Awal persiapan Program Kerja Pemberdayaan yang kami lakukan. Kami melakukan persiapan yang kiranya diperlukan untuk membantu destinasi wisata tersebut. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan saat pertemuan awal. Jadi sebelum melakukan pemberdayaan kami menemui atau pihak pengelola melaporkan pada kami tentang apa yang dibutuhkan di wisata alam tersebut. Tapi sejauh ini persiapan yang kami lakukan lebih sering soal anggaran Dana pemberdayaan”

b. Adanya Tahap Asesement

Tahap Asesement adalah salah satu tahap dimana Data atau Informasi didapatkan. Pada tahap Asessment ini Dinas Pariwisata melakukan kunjungan ke Pantai Sejarah untuk mengetahui perkembangan Pantai dan Hal – hal yang mereka butuhkan. Pak Akhyar mengatakan bahwa

“Setelah tahap perencanaan, perwakilan dari kami memeriksa keadaan pantai guna memastikan bahwa benar karena beberapa factor yang di keluhkan mereka meminta bantuan kepada Dinas”

c. Tahap Perencanaan

Dalam hal ini, Setelah kebutuhan diketahui. Dinas Pariwisata merencanakan anggaran sesuai kebutuhan Pantai Pak Akhyar mengatakan jika :

“Setelah informasi dipastikan benar kami menyusun rencana seuai dengan persiapan yang telah di buat”

d. Tahap Pemformalisasian

Tahap Pemformalisasian adalah tahap dimana adanya sebuah tindakan yang dilakukan untuk membantu pihak terkait dalam

merumuskan, memprogramkan, dan memberikan usul kegiatan apa yang harusnya dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan Dinas Pariwisata yaitu Pengaplikasian untuk membuat icon wisata dan lain – lainnya kepada Pantai – Pantai yang ada di BatuBara. Dalam tahapan ini Pak Akhyar menjelaskan bahwa

“Aksi yang kami lakukan sejauh ini kepada Pantai Sejarah Khususnya adalah Pemberian Dana bantuan untuk pembuatan Objek yang akan di bangun. Jika berkenaan dengan Objek kecil, kami biasanya menyertakan jenis Objek yang kiranya baik untuk di bangun. Dan jika berkenaan dengan pembangunan yang besar bisanya selain pemberian Dana, kami juga membantu dalam komunikasi ke Dinas – Dinas terkait. Kami juga merancang susunan Objek atau program – program pemberdayaan ke wisata alam yang ada di BatuBara”

e. Dilakukan Tahap Termisi

Tahap Temisi merupakan tahap pertemuan. Tahap ini dibagi menjadi dua yaitu pertemuan awal dan pertemuan akhir. Pak Akhyar mengatakan bahwa Tahap Termisi ini dilakukan beliau berkata bahwa

“Jika termisi tidak kami lakukan maka kami tidak akan tau hal apa yang mereka butuhkan dan mereka minta”

Sementara itu Pak Akhyar mengatakan bahwa Dinas Pariwisata tidak melaksanakan untuk Tahap lain dalam indikator pendampingan seperti :

a. Tahap Implementasi

Tahap Implementasi adalah tahap praktik atau pengerjaan. Pada tahap ini tidak dilakukan oleh Dinas Pariwisata melainkan dalam pengerjaannya dilaksanakan oleh masyarakat sekitar

terutama pengurus Pantai. Hal ini diperkuat dengan argument dari Pak Ajizi jika :

“Dinas Pariwisata dalam melakukan pendampingan selama ini hanya berbentuk materil ke Pantai Sejarah. Yang melakukan pengerjaan adalah masyarakat sekitar, apalagi jika itu pembangunan dalam sekala kecil. Namun jika dalam sekala besar seperti kemari program penanaman 1000 Mangrove, itu masyarakat sekitar bekerjasama dengan ormas lain seperti Pemuda Pancasila, Karang Taruna, Ikatan Mahasiswa BatuBara, Ibu PKK, Persatuan Batak Bersatu dan lain – lain. Dinas Pariwisata ikut membantu tapi hanya sebentar”

b. Tahap Evaluasi

Pada tahap Evaluasi ini Pak Ajizi mengatakan bahwa :

”saya tidak tau Dinas Pariwisata melakukan Evaluasi apa terkait pemberdayaan mereka di Pantai Sejarah.Tapi yang pasti mereka hanya mengambil foto bangunan yang dibangun menggunakan Dana yang di berikan mereka”

mereka lakukan terhadap program yang mereka lakukan dan anggarkan kepada Pantai guna melihat tingkat keberfungsian, daya Tarik, hingga ancaman bagi sang pengguna.

Selain itu pendampingan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan serta kreatifitas mereka juga tidak dilakukan Dinas Pariwisata dengan alasan banyaknya kendala yang dihadapi untuk kegiatan tersebut seperti karakter dari masyarakat sekitar yang kurang serius untuk mengikuti kegiatan dan hanya mau hadir jika ada embel – embel seperti uang, makanan atau Dll.



Gambar 4.2.2 Wawancara Dinas Pariwisata

Kendati demikian berkat kerjasama semua pihak terbangunnya icon/wahana wisata di pantai sejarah mampu mencukupi kebutuhan – kebutuhan pokok masyarakat ini disebabkan daya tarik masyarakat lokal maupun non lokal untuk berkunjung menghabiskan waktu liburannya bersama keluarga, teman maupun kekasih Sehingga masyarakat sekitar tetap bisa memenuhi pengasilan mereka dan menambah penghasilan tersebut dengan cara berdagang makanan ringan serta jajanan.

BAB V

PENUTUP

Pada Bab ini penulis akan menuliskan hasil dari kumpulan semua argument wawancara dari okunum terkait. Penulis berusaha untuk menyimpulkan data yang diperoleh melalui teknik wawancara meliputi kinerja dari Dinas Pariwisata terkait Peran DIPORABUDPAR Dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif Masyarakat Di Wilayah Pantai Sejarah Kabupaten BatuBara.

5.1 Simpulan

Dinas Pariwisata telah melaksanakan tugas nya untuk mengadakan pendampingan kepada masyarakat meskipun kurang Efektiv. Hal ini disebabkan karena Dinas Pariwisata melakukan pendampingan secara tidak langsung kepada masyarakat di wilayah Pantai Sejarah. Dikatakan Kurang Efektiv karena Dinas Pariwisata tidak melakukan Indikator – indikator pendampingan yang sangat penting dalam pendampingan seperti tahap Implementasi yang merupakan tahap penanganan langsung kelapangan dan Evaluasi yakni tahap perbaikan program dan cara kerja terhadap pembuatan Icon/wahana wisata di Pantai Sejarah.

Dinas Pariwisata Kabupaten Batu Bara melakukan perannya dengan melaksanakan Indikator Pedampingan yaitu :Tahap Persiapan, Tahap Asessement, Tahap Perencanaan, Tahap Pem – Formalisasion, danTahap Termisi

5.2 SARAN

Setelah mengetahui bagaimana pola pemberdayaan yang dilakukan Dinas Pariwisata terhadap wisata yang ada di BatuBara khususnya Pantai Sejarah maka dengan ini penulis meyarankan agar:

1. Diharap kedepan Dinas Pariwisata mengadakan pemberayaan kepada lokasi wisata sesuai dengan indikator – indikator pendampingan secara lengkap.
2. Diharap Dinas Pariwisata memanfaatkan secara maksimal Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada diwilayah tersebut guna menambah pengetahuan mereka dalam mengelola bahan alam yang tersedia.

Daftar Pustaka

- Arsyam, m. T. (2021). Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif. *Al - Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Study Islam*, vol.2 No.1, 38 - 39.
- Awaludin, M. F., & Ramdani, R. (2022). Peran Kelompok Keagamaan Dalam Menjaga Keharmonisan Dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Suka Bumi). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 8.
- Daulay, Z, A, A. (2018). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Metode Triple Helix. *Jurnal Management Dan Bisnis Islam*, Volume 1 No. 2,
- Faizal (2023). Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Batu Bara. *Journal Of Education*,vol 5
- Fajar, D. (2021). Strategi Branding Bandung Giri Grahana Glof Sebelum dan Saat Pandemi Covid - 19. *Jurnal Purnama Berazam*, vol 2 No 2.
- Haya, S. F., & Tambunan, K. (2022). Pengaruh Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif dan Ekspor Produk Ekonomi Kreatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 82-90.
- Kadeni, & Srijani, N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi Vol 8, No 2*.
- Kusumastuti, A, & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kulaitatif*. Semarang: Lembaga Sukarno Pressindo (LPSP).
- Maryani, D, & Roselin, R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintah*. Malang: UB Press.
- Raintung, A., Sabrina, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *JURNAL GOVERNANCE*, Vol.1, No. 2, 2021.
- Rehawarin, Y. (2018). *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat Di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. *Jurnal Administrasi Publik*,4 (63).
- Wardani, P. K. (2021). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Rangka*

Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada Sektor Kerajinan Di Kabupaten Batu Bara (Analisis pada peran Pemerintah dalam pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Batu Bara Tahun 2021. Medan: Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Windasai, said, m. m & Hayati. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 2 No.3 793-805.

Hajar, S., Tanjung, I. S., & Tanjung, Y. (2018). *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Dimas Pratama
Npm : 2003090061
Tempat dan Tanggal Lahir : P. Siantar, 11 Februari 2002
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Mangkai Baru Kecamatan LimaPuluh
Kabupaten BatuBara
Anak Ke : 2 dari 3 bersaudara
Motto : Teruslah Menjadi Air Yang Mengalir dan
Bermanfaat Bagi Semua Makhluk

Nama Orang Tua

Nama Ayah : M. Suprpto
Nama Ibu : Suratini
Alamat : Desa Mangkai Baru Kecamatan LimaPuluh
Kabupaten BatuBara

Pendidikan Formal

- 1. SD NEGERI 013873 Mangkai Baru**
- 2. SMP NEGERI 1 LIMAPULUH**
- 3. SMK SWASTA AL – WAHSLIYAH 2 PERDAGANGAN**
- 4. Tahun 2020 – 2024, Tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan
Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara**

Medan, 14 Mei 2024


Dimas Pratama

Acc Draft wawancara
7/3/2024
Dr. Jehan Rizka Izharyah MS
NIDN. 0117019201

DRAF WAWANCARA

A. IDENTITAS PENELITI

1. NAMA : Dimas Pratama
2. NPM : 2003090061
3. ALAMAT : Desa Mangkai Baru Dsn VII Kec. Limapuluh
4. No. HP : 0822-1427-4388

B. IDENTITAS RESPONDER/NARASUMBER

1. NAMA :
2. USIA :
3. T.T.L :
4. ALAMAT :

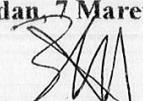
C. PERTANYAAN :

1. (Pemberdayaan Pelaksanaan Program)
 - a. Dinas Pariwisata
 1. Bagaimana tanggapan Dinas Pariwisata terkait perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014 ?
 2. Apa saja persiapan/parameter yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam melakukan program pemberdayaan?
 3. Dimana saja cakup pemberdayaan yang telah dilakukan Dinas Pariwisata?
 4. Mengapa Dinas Pariwisata harus melakukan tahap Aseesment terkait program pemberdayaan yang dilakukan ?
 5. Dalam melakukan pemberdayaan, apakah Dinas Pariwisata melakukan Tahapan seperti :

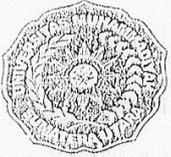
➤ Tahap Persiapan	Tahap Implementasi
➤ Tahap Aseesment	Tahap Evaluasi
➤ Tahap Perencanaan	Tahap Termisi
➤ Tahap Pemformalisasi/Perencanaan	
 6. Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Masyarakat di pantai sejarah ini dapat memberikan daya tarik terhadap Masyarakat di wilayah pantai Sejarah ?
 7. Apakah dalam pelaksanaan Pembedayaan Ekonomi Kreatif Masyarakat yang dilakukan Dinas Pariwisata menjalin Kerjasama dengan kelompok – kelompok lain ?
2. (Perda Kabupaten Batu Bara No. 9 Tahun 2014)
 - a. Kepala Pengelola Pantai
 1. Apakah bapak tau tentang perda Kabupaten BatuBara No. 9 Tahun 2014 tentang rencana induk Pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2014 – 2029 ?

2. Bagaimana pendapat bapak tentang pemberdayaan ekonomi kreatif yang dilakukan Dinas Pariwisata terhadap Masyarakat di wilayah Pantai Sejarah?
3. Apakah ada dampak positif yang didapatkan Masyarakat terkait Pemberdayaan Ekonomi Kreatif yang dilakukan Dinas Pariwisata ?
4. Apakah ada tindakan pemberdayaan ekonomi kreatif yang berkelanjutan terhadap Masyarakat di wilayah Pantai Sejarah oleh Dinas Pariwisata?
5. Bagaimana partisipasi Masyarakat wilayah Pantai Sejarah terhadap pemberdayaan ekonomi kreatif yang dilakukan Dinas Pariwisata ?
6. Apakah ada Masyarakat yang tidak tertarik terhadap pemberdayaan ekonomi kreatif Masyarakat yang dilakukan dinas pariwisata?
7. Adakah kritik Masyarakat terhadap pemberdayaan yang dilakukan dinas pariwisata terhadap pemberdayaan yang dilakukan dinas pariwisata?
8. Mengapa Masyarakat mengkritik program pemberdayaan tersebut ?
9. Saya mendengar bahwa baru – baru ini Dinas Pariwisata bersama kelompok lain bekerja sama membangun hutan mangrove di sini. Menurut bapak, bagaimana dampak yang di timbulkan hutan mangrove tersebut terkait penghasilan yang di dapat Pantai Sejarah
10. Akar hutan mangrove akan menjadi rumah bagi fauna laut, bagaimana dampak yang di akibatkan oleh hutan mangrove terhadap nelayan sekitar?
11. Apakah UMKM di Pantai Sejarah dapat menjadi penghasilan tetap oleh Masyarakat di wilayah Pantai Sejarah ?

Medan, 7 Maret 2024



Dimas Pratama



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1413/SK BAN-PT/AK/P/PT/12022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisp.umsu.ac.id | fisp@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Medan, 13 Desember 2023

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi **KESEJAHTERAAN SOSIAL**
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : **DIMAS PRATAMA**
NPM : **2003090061**
Program Studi : **KESEJAHTERAAN SOSIAL**
SKS diperoleh : **120 SKS, IP Kumulatif 3,74**

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi:

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	PERAN DISPORAPAR DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KERENTAN MASYARAKAT DI WILAYAH PANTAI SEJARA KAB. BATU BARA	ACC
2	COLLABORATIVE DISPORAPAR DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA PANTAI SEJARA	X
3	PERAN EKOWISATA PANTAI SEJARA DALAM MERUMAHKANTIKAN EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR	X

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjaian;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu. Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

019.20.309

Pemohon,

Medan, tanggal 13 Desember 2023

(DIMAS PRATAMA)

Ketua

Dosen Pembimbing yang ditunjuk,

Program Studi **RES.SOS**

Program Studi **Kesejahteraan Sosial**

(
NIDN: 0128088902

(Dr. Jehan Kridha Ichansjil, M.Si
NIDN: 0117019201





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU merupakan salah satu institusi pendidikan yang berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IBAN-PT/Ak.KP/PT/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 2138/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : **13 Desember 2023**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **DIMAS PRATAMA**
N P M : 2003090061
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **PERAN DISPORABUDPAR DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT DI WILAYAH PANTAI SEJARAH KABUPATEN BATU BARA**
Pembimbing : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH., S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 019.20.309 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 13 Desember 2024

Ditetapkan di Medan,

Pada Tanggal, 01 Djumadil Akhir 1445 H
14 Desember 2023 M

a.n. Dekan,
Wakil Dekan-

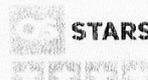


Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI., M.I.Kom.
NIDN. 0111117804



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Kepada : Yth, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Tempat

Prihal : Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Dimas Pratama

Npm : 2003090061

Prodi : Kesejahteraan Sosial

Mengajukan permohonan perubahan judul skripsi, sebagaimana berikut :

Peran Disporapar Dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif Masyarakat Di
Wilayah Pantai Sejarah Kabupaten Batu Bara

Menjadi :

Peran Disporabudpar Dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif Masyarakat Di
Wilayah Pantai Sejarah Kabupaten Batu Bara

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan
selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan
terimakasih.

Medan, 6 Maret 2024

Hormat Pemohon

Mengetahui
Pembimbing

Dr. Zehan Ridho Izharsyah, S.sos., M,SI

Dimas Pratama

Ketua Program Studi
Kesejahteraan Sosial

Dr. H. Mujahidin, S.sos., MSP



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Silva menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📠 umsumedan 📺 umsumedan 📱 umsumedan

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Medan, 16 FEBRUARI 2024

Kepada Yth.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DIMAS PRATAMA
N P M : 200.30.900.61
Program Studi : KESEJAHTERAAN SOSIAL

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 2138/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2023, tanggal, dengan judul sebagai berikut :

PERAN DISKORABUDPAR DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI KREATIF MASYARAKAT DI WILAYAH
PANTAI SEJARAH KABUPATEN BATU BARA

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Dr. Jehan Ridho Abadi M)

NIDN: 0117019201

Pemohon,

(DIMAS PRATAMA)



SK-4

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI!

Nomor : 284/JND/III.3.AU/UMSU-03/F/2024



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Hari, Tanggal : Rabu, 21 Februari 2024
Waktu : 09.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt.2
Pemimpin Seminar : Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL SKRIPSI
6	MUHAMMAD FAHRI	2003090054	Drs. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Dr. EFENDI AGUS., M.Si.	PEMANFAATAN WISATA MANGROVE PARK DALAM MENINGKATKAN EKONOMI SOSIAL KELOMPOK PENGELOLA WISATA DI DESA PERUPUK KECAMATAN LIMA PULUH PESIR KABUPATEN BATU BARA
7	ERRA FADHILLAH HARAHAP	2003090009	Dr. EFENDI AGUS., M.Si.	Drs. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI UPT. PELAYANAN ANAK REMAJA TANJUNG MORAWA DINAS SOSIAL
8	ARFA NABILLAH	2003090045	Dr. JEHAN RIDHO ZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Drs. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	PERAN ORANGTUA ASUH DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR ANAK DI YAYASAN PENDIDIKAN PANTI ASUHAN DARUL IKHLAS LABUHAN RUKU KECAMATAN TALAWI KABUPATEN BATU BARA
9	SRI PURNAMA SARI	2003090026	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos. M.SP.	TINJAUAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA PEDAGANG UMUM DI TAMA WISATA IMAN PASCA COVID 19
10	DIMAS PRATAMA	2003090061	Drs. Hj. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Dr. JEHAN RIDHO ZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	PERAN DISPORAPAR DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT DI WILAYAH PANTAI SEJARAH KABUPATEN BATU BARA

Medan, 20 Januari 2024 M

06 Januari 2024 M

(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

021-6622400 | 021-66224567 | 021-6625474 | 021-6631003

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KPIPT/10/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 482/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 05 Ramadhan 1445 H
15 Maret 2024 M

Kepada Yth : **Kepala DISPORABUDPAR Kabupaten Batu Bara**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **DIMAS PRATAMA**
N P M : 2003090061
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **PERAN DISPORABUDPAR DALAM MENINGKATKAN EKONOMI
KREATIF MASYARAKAT DI WILAYAH PANTAI SEJARAH
KABUPATEN BATU BARA**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
**DINAS PEMUDA OLAHRAGA
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jln. Besar Dusun III Desa Perupuk, Kecamatan Datuk Lima Puluh,
Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara Kodepos 21255

Lima Puluh Pesisir, 25 April 2024

Nomor : 000.9.E.1/0668
Lamp. : -
Perihal : Izin Melaksanakan Kegiatan
Penelitian

Kepada Yth. DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Di

Medan,-

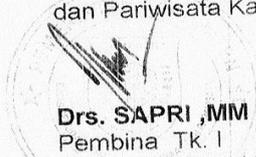
Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara Nomor : 482/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 15
Maret 2024 Perihal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara, memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan
penelitian untuk bahan penyusunan skripsi, kepada :

Nama Mahasiswa : **DIMAS PRATAMA**
NIM : 2003090061
Program : Strata 1 (S.1)
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Judul Penelitian : Peran Disporabudpar Dalam Meningkatkan Ekonomi
Kreatif Masyarakat di Wilayah Pantai Sejarah
Kabupaten Batu Bara.

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan
sebagaimana mestinya..

Kepala Dinas
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara


Drs. SAPRI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700710 199801 1 002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

IMSU

11 Cerdas | Terpercaya

Insanis: Surat agar insesetukan
 dan tamabahnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IBAN-PT/AK.KP/PT/XII/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : DIMAS Pratama
 N P M : 2003090061
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial
 Judul Skripsi : Peran DISFORABUOPAR Dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif Masyarakat di Wilayah Pantai Sejarah

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	31/12-2023	Bimbingan judul Skripsi dan Acc Judul	H
2	4/01-2024	Bimbingan Bab 1-3	H
3	16/02-2024	Penetapan judul / perbaikan Judul	H
4	19/02-2024	Acc Bab 1-3	H
5	7/3-2024	Bimbingan wawancara	H
6	23/4-2024	Bimbingan Hasil wawancara	H
7	3/5-2024	Bimbingan Bab 4-5	H
8	6/5-2024	Bimbingan Bab 4-5	H
9	14/5-2024	Acc skripsi	H

Medan, 16 Mei 2024



(Drs. Samrahan Samudra, S.Sos., M.S.P.)
 NIDN: 0030017462

Ketua Program Studi,

(Samrahan Samudra, S.Sos., M.S.P.)
 NIDN: 0101018701

Pembimbing

(Dr. Johan Rully Bhaerul H.S.)
 NIDN: 01117619201



Agensi Kelayakan Malaysia
 Malaysian Qualifications Agency



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 8117/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Pogram Studi : Kesejahteraan Sosial
Hari, Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	ANANDA GITA SARI BR GINTING	2003090057	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA UNTUK MENGATASI RESIKO STUNTING PADA BALITA DI DESA CINTA RAKYAT KECAMATAN MERDEKA KABUPATEN KARO
2	MIFFAHUL HUSNA	2003090056	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	STRATEGI YAYASAN MENTARI MERAKI ASA (YMMA) DALAM MEMOTIVASI PASIEN PENYAKIT TUBERKULOSIS RESISTEN OBAT (TB RO) DI KABUPATEN LANGKAT
3	NUR AZLINA	2003090050	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	KONTRIBUSI REMITAN TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI KELUARGA DI DESA LIMA LARAS, KABUPATEN BATU BARA
4	DIMAS PRATAMA	2003090061	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	PERAN DISPORABUPPAR DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT DI WILAYAH PANTAI SEJARAH KABUPATEN BATU BARA
5						

Medan, 12 Dzulqalidah 1445 H
20 Mei 2024 M

Carabot Perat, 4 mks
20/05/24
-fms

Notulis Sidang:
1. Ditetaskan oleh:
Rektor
Wakil Rektor I
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH., M.Hum

Panitia Ujian
Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Dimas Pratama
Npm : 2003090061
Tempat dan Tanggal Lahir : P. Siantar, 11 Februari 2002
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Mangkai Baru Kecamatan LimaPuluh
Kabupaten BatuBara
Anak Ke : 2 dari 3 bersaudara
Motto : Teruslah Menjadi Air Yang Mengalir dan
Bermanfaat Bagi Semua Makhluk

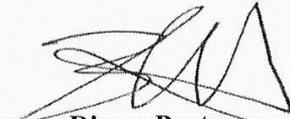
Nama Orang Tua

Nama Ayah : M. Suprpto
Nama Ibu : Suratini
Alamat : Desa Mangkai Baru Kecamatan LimaPuluh
Kabupaten BatuBara

Pendidikan Formal

1. SD NEGERI 013873 Mangkai Baru
2. SMP NEGERI 1 LIMAPULUH
3. SMK SWASTA AL – WAHSLIYAH 2 PERDAGANGAN
4. Tahun 2020 – 2024, Tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan
Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 14 Mei 2024


Dimas Pratama